

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stakeholder*

Stanford Reseach Institute merupakan pihak menggunakan istilah *stakeholder* untuk pertama kalinya pada tahun 1963 yang dimana teori tersebut dikembangkan oleh Freeman yang sekarang dikenal sebagai bapak teori *stakeholder*. Menurut Freeman (1984) *stakeholder* adalah pihak yang memberikan pengaruh atau yang berpengaruh atas kegiatan suatu organisasi atau entitas. Pihak tersebut seperti *shareholder*, kreditor, konsumen atau pembeli, *supplier* atau pemasok bahan baku, pemerintah, masyarakat setempat, karyawan yang bekerja, dan berbagai pihak lain. Teori ini menegaskan bahwa pemegang saham bukanlah satu-satunya pihak yang berkepentingan terhadap suatu organisasi, namun terdapat pihak-pihak lain di sekeliling organisasi bisnis tersebut.

Pengertian teori *stakeholder* yang lain dikemukakan oleh Ghozali & Chariri (2007) yang menyatakan bahwa teori *stakeholder* adalah teori yang harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*-nya yang dimana perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan pribadi entitas, melainkan memberikan perhatian kepada pihak-pihak yang terlibat. Sehingga dengan adanya teori *stakeholder* diharapkan suatu organisasi dapat menjaga hubungan baik dengan para

stakeholder-nya dengan cara memberikan informasi sesuai dengan apa yang dapat dimanfaatkan oleh *stakeholder* tersebut.

Teori *stakeholder* mengalami perkembangan dengan diiringi pendekatan suatu organisasi ketika melakukan aktivitas operasionalnya.

Menurut Budimanta, et al. (2008) terdapat dua bentuk pendekatan *stakeholder*, yaitu *old corporate relation* dan *new corporate relation*.

Old corporate relation merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam melakukan kegiatan operasionalnya tidak ada kesatuan dengan pihak lain. Dapat dikatakan adanya pemisah antara organisasi tersebut dengan *stakeholder* sehingga yang terjadi hanya sebatas kegiatan transaksi saja tanpa mementingkan kepentingan jangka panjangnya. Hal ini terjadi karena organisasi tersebut melakukan pemisahan diri dengan para *stakeholder*-nya. Namun, seiring berjalannya waktu konsep tersebut mulai pudar dan digantikan dengan konsep baru, yaitu *new corporate relation*. *New corporate relation* merupakan kegiatan yang dilakukan suatu organisasi dengan tidak memisahkan diri dengan para *stakeholder*-nya. Sehingga adanya hubungan baik yang terjalin diantara berbagai pihak.

Pada awalnya istilah *stakeholder* ini digunakan untuk sektor swasta.

Sektor swasta mengalami perkembangan yang besar dan menyebabkan masyarakat memperhatikan perusahaan, sehingga akuntabilitas perusahaan harus ditunjukkan. Namun, seiring berjalannya waktu sektor publik juga mengalami perkembangan. Sektor privat atau swasta terlibat

dalam proses kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah karena pemerintah memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan. Adanya keterlibatan sektor privat terhadap sektor publik memungkinkan perlibatan sumber daya non pemerintah untuk tercapainya kebutuhan publik. Sehingga tidak hanya pada sektor swasta saja yang harus melakukan akuntabilitas terkait pertanggungjawaban, namun pemerintah juga harus memiliki sifat akuntabilitas dengan cara mempublikasikan laporan keuangan pemerintah daerah sehingga masyarakat luas dapat memperoleh informasi. Pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi hak masyarakat, bank sebagai kreditor pemerintah, dan para investor.

Teori *stakeholder* berkaitan dengan upaya yang dilakukan perusahaan dalam menjaga hubungan baik dengan *stakeholder* tersebut supaya mereka memiliki kepercayaan terhadap entitas, salah satu untuk meningkatkan kepercayaan adalah dengan mempublikasikan laporan keuangan kepada publik. Entitas yang ditujukan pada penelitian ini adalah pemerintah yang harus menyajikan laporan keuangan berkualitas sehingga bermanfaat bagi *stakeholder* dalam pengambilan keputusan.

Adanya teori *stakeholder* mengharuskan pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya tersebut guna tercapainya kepentingan *stakeholder*, selain itu teori ini dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik karena adanya komitmen yang dipegang oleh pemerintah

terhadap *stakeholder*-nya. Penyajian dan kinerja keuangan pemerintah dapat tercermin melalui laporan keuangan yang disajikan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan adanya kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dari entitas tersebut. Kompetensi sumber daya manusia yang dimaksud adalah kemampuan orang-orang yang terlibat di dalam proses pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berbicara mengenai proses pembuatan laporan keuangan hingga pelaporan berupa penyampaian kepada para *stakeholder*. Ketika kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasinya baik maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dimana laporan keuangan tersebut memiliki manfaat ekonomi bagi para *stakeholder*.

2.1.2 Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan berisi catatan-catatan akuntansi yang berasal dari transaksi yang dilakukan oleh seorang pegawai dimana laporan tersebut dapat menggambarkan kondisi suatu entitas.

Laporan Keuangan merupakan hasil fisik sebagai tanggungjawab pemerintah daerah kepada *stakeholder* (Yusuf, 2013). Laporan keuangan disajikan secara objektif yang dimana tidak berpihak kepada siapapun

sehingga informasi memiliki makna bagi pihak internal dan maupun pihak eksternal. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan dalam suatu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dimana laporan keuangan pemerintah berisikan laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL, laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK.

2.1.3 Kualitas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)

Menurut SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) terdapat empat macam karakteristik kualitas informasi keuangan yang telah diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, yaitu:

1. Relevan

Informasi keuangan disebut relevan jika fakta atau bukti yang tertera pada laporan keuangan dapat memberikan pengaruh kepada *stakeholder* untuk mengambil keputusan sehingga informasi tersebut memiliki manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap.

2. Andal

Informasi keuangan dikatakan andal jika informasi yang disajikan menjelaskan deskripsi atau peristiwa yang sebenarnya terjadi sehingga informasi tersebut harus dapat diverifikasi yang dapat diuji kebenarannya, netral sehingga laporan keuangan tidak berpihak kepada siapapun, dan disajikan secara wajar.

3. Dapat dibandingkan

Informasi keuangan dikatakan dapat dibandingkan jika informasi yang disajikan dapat dibandingkan antar tahun maupun antar industri. Sehingga dapat dilihat perubahannya dari waktu ke waktu maupun untuk melihat keunggulan kompetitif antar industri.

4. Dapat dipahami

Informasi keuangan dikatakan dapat dipahami jika informasi yang disajikan dapat dimengerti oleh para penggunanya dimana pengguna informasi memiliki pengetahuan memadai mengenai bisnis dan akuntansi. Cara memperoleh pengetahuan tersebut dapat dilakukan dengan formal ataupun informal.

2.1.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi menurut UU No 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 10 tentang ketenagakerjaan adalah dalam melakukan pekerjaan maka setiap orang harus mempunyai berbagai unsur pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap kerja berkaitan dengan etika seorang pekerja yang sesuai dengan standar yang diterapkan. Sedangkan Guy et al. (2002), menyatakan bahwa kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi aparatur pemerintah daerah berarti kemampuan yang harus dimiliki seorang aparatur dalam melakukan tugasnya. Kompetensi aparatur yang baik akan membuat kualitas laporan keuangan yang baik.

Menurut Spencer & Spencer (1993) kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik individu sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang di jadikan acuan di tempat kerja atau pada situasi tertentu. Kesuksesan suatu entitas dalam mencapai visinya sangat ditentukan oleh kualitas dan kecakapan yang dimiliki oleh pegawai yang bekerja di dalam organisasi tersebut. Dalam organisasi publik, kompetensi sumber daya manusia lebih menekankan pada kecakapan dalam menyalurkan pelayanan yang terbaik untuk masyarakatnya, sehingga diharapkan organisasi memiliki reputasi kinerja yang luhur menurut penilaian masyarakat. Sebab itu, kompetensi sumber daya manusia pada setiap level manajemen menjadi bagain penting baik tingkatan *top management* atau *low management*.

Hutapea, et al. (2008) mengatakan bahwa terdapat tiga segmen penting dalam pembentukan kompetensi, yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan perilaku atau etika. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang dan dimanfaatkan oleh seorang pegawai dalam melakukan pekerjaannya.

Pengetahuan dapat mengakibatkan keberhasilan tugas yang dilakukan.

Setiap pegawai harus memiliki pengetahuan yang baik supaya menghasilkan kinerja pekerjaan yang efektif dan efisien.

2. Keterampilan

Keterampilan adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan kemampuan yang unggul sehingga tujuan organisasi cepat tercapai. Di dalam sebuah organisasi atau entitas diperlukan pegawai yang memiliki keterampilan yang baik, seperti keterampilan dalam berkomunikasi sehingga dapat memotivasi orang-orang yang ada di dalam organisasi atau entitas.

3. Perilaku

Perilaku adalah sikap yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab. Pegawai harus memiliki perilaku yang baik supaya memudahkan tujuan organisasi. Jika pegawai memiliki perilaku yang baik maka tugas yang dilakukannya akan dijalankan sesuai peraturan yang berlaku dan pegawai merasa memiliki tanggung jawab yang penuh atas tugas tersebut, sehingga tidak akan membuat kerugian bagi suatu entitas.

2.1.5 Pemanfaatan pada Teknologi Informasi

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 menjelaskan tentang sistem informasi keuangan daerah disebutkan bahwa pemerintah wajib memperluas dan menggunakan kemajuan pada teknologi informasi untuk memperkuat kapabilitas dalam mengelola keuangan daerah, dan mempublikasikan informasi keuangan daerah kepada masyarakat secara luas. Adanya pertumbuhan teknologi informasi serta kekuatan pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka kesempatan bagi

berbagai grup atau himpunan untuk mengakses dan mengendalikan informasi keuangan daerah secara sigap dan tepat. Manfaat lain dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Sistem akuntansi di Pemerintah Daerah memiliki transaksi yang rumit dan ukuran yang relatif besar. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat disajikan secara tepat waktu. Penerapan teknologi informasi dalam laporan keuangan yaitu, ketika teknologi informasi dipergunakan sebaik mungkin akan mendukung proses pencatatan hingga *output* dari laporan keuangan itu sendiri. Selain itu, juga dapat dipergunakan untuk pelaporan keuangan berupa penyampaian kepada berbagai pihak.

Menurut Mulyadi (2014) komputer yang terdiri dari perangkat keras atau *hardware* dan perangkat lunak atau *software*, berbagai peralatan kantor elektronik, perlengkapan pabrik dan telekomunikasi disebut teknologi informasi. Teknologi informasi terdiri dari perangkat lunak atau *software* yang merupakan kumpulan data-data yang disimpan di dalam komputer dan dijalankan oleh perangkat keras atau disebut *hardware* yang dapat dipegang maupun diraba, jaringan internet yang dapat dipergunakan oleh pemakainya untuk mengakses data agar lebih cepat dan mudah dan untuk berkomunikasi antar divisi suatu organisasi, dan *database* yang bertugas untuk menyimpan segala informasi atau data-data secara terpusat yang saling berhubungan pada setiap komputer sehingga dapat digunakan secara bersama-sama

dalam suatu organisasi atau instansi. Komponen-komponen yang ada di dalam teknologi informasi sangat erat kaitannya satu sama lain karena cara bekerja mereka saling mendukung sehingga dapat menciptakan suatu teknologi informasi yang bermanfaat bagi para pemakainya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Syarifudin (2014) bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi SDM dan peran audit internal terhadap kualitas pada LKPD secara langsung atau dimediasi oleh sistem pengendalian internal pemerintah. Populasi penelitian mencakup semua bagian yang bekerja pada pemerintah Kabupaten Kebumen. Pengambilan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Hasil pengujian menunjukkan tidak ada pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan peran audit terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah.

Dua tahun kemudian, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Harnoni (2016) bertujuan untuk menguji pengaruh yang berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pulau Anambas. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja pada SKPD Pulau Anambas yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, jurnal sampel yang diambil sebanyak 81 orang. Uji hipotesis penelitian adalah analisis regresi linier berganda. Hasilnya terdapat pengaruh positif kapasitas SDM dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan untuk

pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah.

Dua tahun selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Julita (2018) untuk menguji bagaimana pengaruh kualitas SDM, pengendalian internal, penggunaan teknologi dan penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. Terdapat 81 populasi pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling* dan teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner. Analisis data dilakukan dengan model regresi linier berganda. Temuan pengujian menunjukkan kualitas SDM, pengendalian internal, serta penggunaan teknologi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. Sedangkan, penerapan SAP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Selain itu, penelitian juga dilakukan oleh Sholohah & Sulistyawati (2018) untuk menguji penerapan *good government governance*, penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah, kompetensi SDM, dan pemahaman sistem akuntansi keuangan yang mana hasilnya tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penerapan pengawasan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada tahun yang sama juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, et al. (2018) untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi SDM dan pemanfaatan TI terhadap kualitas laporan keuangan melalui pengelolaan BMD

(Barang Milik Daerah). Sehingga diperoleh hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan pemanfaatan TI mempunyai pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan, kompetensi SDM memiliki pengaruh positif pada pengelolaan barang milik daerah, dan pemanfaatan TI tidak memiliki pengaruh pada pengelolaan barang milik daerah.

Tahun selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Tampubolon dan Basid (2019) untuk menguji komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan pada komitmen organisasi pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kompetensi SDM memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kualitas LKPD, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas LKPD.

Pada tahun selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Wibowo & Darmanto (2019) untuk menguji penerapan tata pemerintahan yang baik, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan tata pemerintahan yang baik, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal mempunyai pengaruh yang positif dengan kualitas laporan keuangan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis Penelitian Terdahulu	Variabel Penelitian	Kesimpulan
1.	Syarifudin (2014)	<p>Dependen: Kualitas pada laporan keuangan.</p> <p>Independen: Kompetensi SDM dan peran audit internal.</p>	<p>1. Kompetensi SDM tidak berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.</p> <p>2. Peran audit internal tidak memiliki pengaruh positif terhadap kualitas LKPD.</p>
2.	Harnoni (2016)	<p>Dependen: Kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah.</p> <p>Independen: Kapasitas SDM, Pemanfaatan teknologi informasi, dan Sistem pengendalian internal.</p>	<p>1. Terdapat pengaruh positif pada kapasitas SDM terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah.</p> <p>2. Pemanfaatan teknologi informasi tidak ada pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah.</p> <p>3. Sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p>
3.	Julita (2018)	Dependen: Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	1. Memiliki pengaruh positif pada kapasitas SDM terhadap kualitas laporan

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Penulis Penelitian Terdahulu	Variabel Penelitian	Kesimpulan
		Independen: Kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, system application and processing (SAP)	keuangan pemerintah pada Kabupaten Bengkalis. 2. Sistem pengendalian internal (SPIP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bengkalis. 3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bengkalis. 4. Aplikasi SAP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bengkalis.
4.	Sholohah & Sulistyawati (2018)	Dependen: Kualitas laporan keuangan Independen: Penerapan tata pemerintahan yang baik, penerapan standar akuntansi	1. Penerapan tata pemerintahan yang baik, penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah, kompetensi SDM, dan

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Penulis Penelitian Terdahulu	Variabel Penelitian	Kesimpulan
		<p>pemerintahan, kualitas aparatur pada pemerintah daerah, kompetensi SDM, pemahaman sistem akuntansi, dan penerapan dalam pengawasan.</p>	<p>pemahaman sistem akuntansi keuangan yang mana hasilnya tidak ada pengaruh pada kualitas laporan keuangan.</p> <p>2. Penerapan pengawasan mempunyai pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan.</p>
5.	Wahyuni, et al. (2018)	<p>Dependen: Kualitas laporan keuangan dan Pengelolaan barang milik daerah</p> <p>Independen: Kompetensi SDM dan pemanfaatn TI</p>	<p>1. Terdapat pengaruh positif pada Kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan daerah.</p> <p>2. Terdapat pengaruh positif pada Pemanfaatan TI terhadap kualitas laporan keuangan daerah.</p> <p>3. Kompetensi SDM memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan barang milik daerah.</p> <p>4. Pemanfaatn TI tidak mempunyai pengaruh pada pengelolaan barang milik daerah</p>

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Penulis Penelitian Terdahulu	Variabel Penelitian	Kesimpulan
6.	Tampubolon & Basid (2019)	<p>Dependen: Kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah.</p> <p>Independen: komitmen organisasi, kompetensi SDM, dan pemanfaatan TI.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Terdapat pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 3. Tidak memiliki pengaruh pada pemanfaatan TI terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
7.	Wibowo & Darmanto (2019)	<p>Dependen: Kualitas pada laporan keuangan</p> <p>Independen: Pemerintahan yang baik, pemanfaatan TI, dan pengendalian internal.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pengaruh pemerintahan yang baik pada kualitas laporan keuangan. 2. Terdapat pengaruh pemanfaatan TI pada kualitas laporan keuangan. 3. Terdapat pengaruh pengendalian internal pada kualitas laporan keuangan.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja pegawai yang baik dipengaruhi oleh salah satu faktor, yaitu kompetensi atau kemahiran pada SDM yang dimiliki oleh suatu entitas. Setiap pegawai harus memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan perilaku yang baik untuk suatu pekerjaan yang dilakukan terhadap entitasnya. Pengetahuan merupakan suatu ilmu seperti ilmu akuntansi, ketrampilan merupakan keahlian atau *skill* yang dimiliki seseorang dalam praktek seperti pembuatan jurnal dan *posting* buku besar, dan perilaku yang baik merupakan norma yang dimiliki oleh seseorang untuk menegakkan integritas.

Mengacu pada teori *stakeholder* yang menerangkan bahwa *stakeholder* merupakan pihak yang dapat berpengaruh ataupun yang dapat dipengaruhi oleh suatu entitas maka akan memungkinkan bahwa sumber daya manusia yang merupakan pegawai pemerintah daerah sebagai *stakeholder* dapat memberikan dampak dan memperoleh dampak dari kualitas laporan keuangan milik pemerintah daerah. Ketika seseorang memiliki kompetensi atau kemahiran yang unggul maka dihasilkannya kinerja yang baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai yang salah satunya dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, et al. (2018) membuktikan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan pada pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan semakin hebat kompetensi SDM akan meningkatkan taraf kualitas pada laporan keuangan, dan sebaliknya semakin buruk kompetensi SDM maka akan menurunkan taraf kualitas dari laporan keuangan tersebut.

Menurut riset yang digarap oleh Sholohah & Sulistyawati (2018) membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan karena kondisi kompetensi sumber daya manusia yang belum mendukung baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kualitas, pegawai akuntansi tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Dari sisi kuantitas, pegawai yang berpendidikan akuntansi jumlahnya sedikit.

Berdasarkan uraian diatas, perlunya untuk dilakukan penelitian ulang untuk mengetahui bagaimana hubungan antara kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H1: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemanfaatan teknologi informasi, yaitu penyelesaian tugas dan meningkatkan kinerja dengan menjalankan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi terdiri dari suatu informasi dan data yang diolah, terdapat pengaturan sistem manajemen, melakukan pekerjaan dengan media elektronik, pemanfaatan internet agar informasi yang

diberikan oleh pemerintah dapat diakses secara mudah dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat (Hamzah, 2007).

Mengacu pada teori *stakeholder* yang berbicara *stakeholder* merupakan pihak yang dapat berpengaruh ataupun yang dapat dipengaruhi oleh suatu entitas maka terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dapat berpengaruh pada kualitas di dalam laporan keuangan. Kemajuan TI yang kilat serta kecakapan pemanfaatannya secara menyeluruh dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Manfaat lain yang diterima dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah durasi waktu dalam pemrosesan data. Oleh karena itu, dengan pemanfaatan TI diharapkan dapat mempersingkat waktu pada operasi pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan. Pemanfaatan TI yang tepat dan didukung oleh kemahiran individu dalam mengoperasikan teknologi yang dimaksud akan menaikkan kualitas pada laporan keuangan.

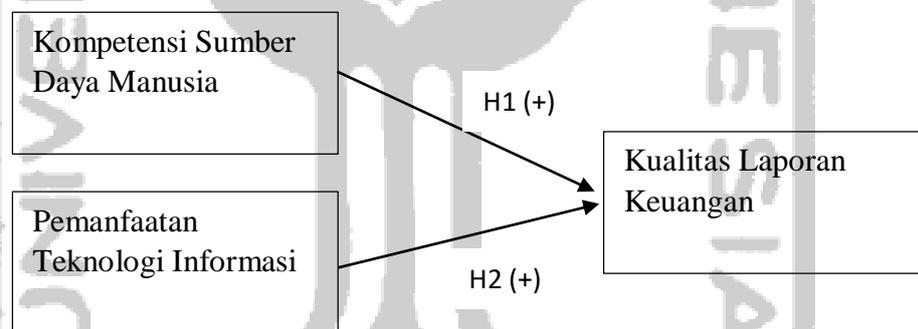
Penelitian mengenai pemanfaatan teknologi informasi telah dilakukan oleh Pratama dan Yahya (2019) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif pemanfaatan teknologi informasi pada kualitas laporan keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa jika pemanfaatan suatu teknologi digunakan secara efektif dan efisien akan mempermudah dan mempercepat pekerjaan.

Menurut riset Tampubolon & Basid (2019) memberikan kesimpulan bahwa teknologi informasi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas

laporan keuangan pada pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa teknologi tidak dapat dimanfaatkan dengan tepat dengan kondisi teknologi informasi semakin canggih yang tidak dibarengi dengan pemahaman, penguasaan dan diperlukan pelatihan dan proses kerja yang baik.

Berdasarkan uraian diatas, diperlukannya untuk dilakukan penelitian kembali untuk mengetahui bagaimana hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah.

H2: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.



Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran